

MEWUJUDKAN *OPEN GOVERNMENT* DAN *ELECTRONIC GOVERNMENT* DALAM KERANGKA SDGs DI PEMPROV DKI JAKARTA

Muh. Kadarisman, Izzatusholekha, dan Dwiky Lucky Adiyasha

Program Studi Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: muh.kadarisman@umj.ac.id

ABSTRAK

Capaian pelaksanaan SDGs di Pemprov DKI Jakarta, hingga sekarang belum terealisasi dalam semua aspek, meskipun upaya mewujudkan sebagian tujuan SDGs telah mengarah pada pembangunan berkelanjutan. Kompleksnya permasalahan yang ada membuat tidak mudahnya mewujudkan keberhasilan tujuan SDGs. Tujuan penelitian adalah menganalisis *Open Government* dan *Electronic Government* dalam Kerangka SDGs di Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dan pendekatan kualitatif, karena menjelaskan dan menganalisis fenomena objek penelitian ini. Hasil penelitian, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membuat kebijakan sistem *open data* terkait sistem pelayanan informasi publik, yang pelaksanaannya dapat diwujudkan melalui program *Jakarta Open Data* dan *e-government*. Hal ini merupakan salah satu program dari Pemprov DKI Jakarta berbentuk portal data berbasis terpadu yang menyediakan berbagai data dari keseluruhan Unit Kerja di Pemprov DKI Jakarta. Dengan *Jakarta Open Data* dan *e-governance tersebut*, maka mampu menyajikan basis data pembangunan dengan pelayanan efektif dan efisien kepada masyarakat secara valid, terbuka, terintegrasi, dan *platform* berbasis *online* atau *web* tersebut telah digunakan sebagai sarana komunikasi yang interaktif antar pejabat pemerintah dan masyarakat, sehingga semua informasi atau pesan pembangunan dapat tersampaikan.

Kata kunci: open government; electronic government; kerangka SDGs

ABSTRACT

The achievements of the implementation of the SDGs in the Jakarta Provincial Government, until now have not been realized in all aspects, even though efforts to realize some of the SDGs goals have led to sustainable development. The complexity of the problems that exist makes it not easy to realize the success of the SDGs goals. The purpose of the study is to analyze *Open Government* and *Electronic Government* in the SDGs Framework in the DKI Jakarta Provincial Government. This study uses a descriptive method, and a qualitative approach, because it explains and analyzes the phenomenon of this research object. The results of the research show that the Jakarta Provincial Government has made a data system policy related to the public information service system, which can be realized through the *Jakarta Open Data* and *e-government* programs. This is one of the programs from the DKI Jakarta Provincial Government in the form of an integrated-based data portal that provides various data from all Work Units in the DKI Jakarta Provincial Government. With *Jakarta Open Data* and *e-governance*, it is able to present a development database with effective and efficient services to the community in a valid, open, integrated, and *online* or *web-based* platform. It has been used as an interactive means of communication between government officials and the community, so that all development information or messages can be conveyed.

Keywords: open government; electronic government; SDGs framework

A. PENDAHULUAN

Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang disepakati tahun 2015 di United Nations, merupakan keberlanjutan dari *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs membawa 5 prinsip yaitu *people, planet, prosperity, peace, and partnership*, sehingga mampu menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. SDGs menyepakati 17 tujuan dan 169 sasaran, yang berbeda

dengan MDGs. Dalam prosesnya, MDGs memiliki kelemahan, karena penyusunan hingga implemenntasinya sangat eksklusif dan sangat birokratis, tanpa melibatkan peran *stakeholders* nonpemerintah, seperti kalangan universitas, *civil society organization*, sektor bisnis dan swasta, serta kelompok lainnya (Hardiana, 2018).

Penyusunan SDGs memiliki beberapa tantangan, karena masih ada beberapa butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs (Sofianto, 2022). Penerapan SDGs di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) yaitu adanya *e-government* dan *open government*, menjadi sarana komunikasi masyarakat Jakarta. Kondisi demikian, untuk menunjang kegiatan Pemda DKI Jakarta, guna lebih memudahkan pelayanan terhadap *stakeholder*. Kualitas portal *web* tersebut, dari segi informasi, relevansi, dan ketersediaannya menjadi sorotan *stakeholder*, karena status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal tersebut menuntut penerapan *electric government (e-government)* maupun *open government* yang terbaik. Upaya Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Dalam pengaplikasiannya, teknologi informasi tersebut digunakan untuk kegiatan *e-government*, fungsinya memberikan dampak peningkatan efisiensi pelayanan publik dan mewujudkan *open government* yang demokratis. Namun, kompleksnya permasalahan yang ada, hal ini membuat tidak mudahnya mewujudkan SDGs bagi Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakatnya. Fenomena permasa

lahan tersebut yaitu adanya problem pertama tentang *performance*. Dalam proses pelaksanaan *e-government* maupun *open government* ini, tentu tidak semua berhasil dilaksanakan. Hal ini dikarenakan, kurangnya dukungan pemegang kekuasaan di Pemprov DKI Jakarta.

Fenomena kedua, tentang *information*, bahwa pengamatan yang dilakukan terhadap situs *e-government* maupun *open government* dalam penerapannya di Jakarta, ternyata menampilkan informasi yang kurang relevan, karena kurang di-*update* secara berkala. Ada pun fenomena ketiga, masalah *economics*, yaitu belum adanya tahapan yang pasti untuk dijadikan acuan dalam pengembangan *e-government* dan *open government* di Pemprov DKI Jakarta, sehingga penerapannya belum berhasil secara optimal. Sedangkan fenomena keempat, *control and security*, yaitu kurang adanya kontrol dan monitoring dalam penerapan *e-government* dan *open government* di Jakarta. Di samping itu, masih kurangnya kesediaan dan kemampuan masyarakat di Jakarta dalam penggunaan layanan *information and communication technologies (ICT)* tersebut.

Berikutnya terkait fenomena keamanan data dan jaringannya di Jakarta yang masih belum memadai, dan fenomena kelima adalah *efficiency*, yaitu hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih mengalami kesulitan dalam meng-*update* informasi pada situsnya. Hal ini ditunjukkan belum maksimalnya sarana yang memudahkan proses tersebut, sedangkan fenomena keenam adalah terkait *services*, bahwa pelayanan Pemprov DKI Jakarta kepada masyarakatnya, hingga saat ini belum optimal. Terkait permasalahan ini, misalnya masih kurangnya sosialisasi dan belum optimalnya insentif penunjangnya.

Berbagai permasalahan di atas, menunjukkan letak pentingnya penelitian ini dilakukan dengan segera, untuk menemukan jawabannya terhadap permasalahan dan menjawab tujuan penelitian yang ada. Terdapat teori *e-government* dalam mengimbangi perkembangan secara dinamis serta pergerakan masyarakat di Jakarta, sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat tetap menyesuaikan pelayanannya dengan kondisi masyarakatnya.

Secara umum, *e-government is broadly defined, e-gov includes the use of all information and communications technologies from fax machines to wireless palm pilots to facilitate the daily administration of government*. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat, seiring dengan pemanfaatan komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua sektor kehidupan tanpa terkecuali terkait urusan pemerintahan, maka istilah yang semula populer dengan “Sistem Informasi

Pemerintahan” (*Government Information System*), kini telah bergeser menjadi istilah *electronic government* (*e-government*).

Dengan demikian, *e-government* adalah layanan *information and communication technologies* (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta, dan pemerintah (Masyhur, 2017). *E-Government*. Tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), telah berimbas pada peningkatan layanan informasi pemerintah kepada warganya yaitu: 1. *Government to Citizen* (G2C), adalah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat, untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi di antara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan. 2. *Government to Business* (G2B), yaitu tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis (Jayanti, 2017).

Dikarenakan sangat dibutuhkannya relasi yang sangat baik, di antara pemerintah dengan kalangan bisnis, dan bertujuan untuk kemudahan berbisnis oleh masyarakat dari kalangan pebisnis. 3. *Government to Government* (G2G), ialah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan tersebut bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan di antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar serta mempermudah kerja sama antar pemerintah yang bersangkutan. 4. *Government to Employees* (G2E), yaitu tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya.

Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan (Aparatur Sipil Negara/ASN) (Pegawai Negeri Sipil/PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja/P3K) dapat meningkatkan kinerja, beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah. 5. *Government to Non-Profit* (G2N), merupakan tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti *Non Government Organization* (NGO), Partai Politik, dll.

Hubungan dalam G2N tersebut, bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat dikelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. Peningnya *e-government* di atas, salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju (Lely, 2016). *Pemeringkatan e-government*. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan *e-government*, hal ini diharapkan mampu menciptakan hubungan yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan seluruh masyarakat, dan tercapainya predikat *good government* (kepemerintahan yang baik) untuk Pemprov DKI Jakarta.

Untuk mewujudkan *open government* dalam kerangka SDGs di DKI Jakarta, ditegaskan bahwa *open government* di sini adalah inisiatif untuk mendorong Pemerintah DKI Jakarta yang terbuka dan partisipatif untuk mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat. Ditegaskan oleh Global Integrity (dalam Laurenti et al, 2017), bahwa *open government* mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. *United Nations* menegaskan bahwa pemerintahan terbuka (*Open Government*) sebagai pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya, pekerjaannya transparan dan akuntabel, dan setiap orang dapat mengakses layanannya (*Good Governance*) (Mariam, 2017).

Di samping itu, Pemerintah juga harus tanggap terhadap kebutuhan warganya, menghargai partisipasi, pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pengambilan keputusan, serta mengadopsi teknologi modern dan berkembang untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Peningkatan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas adalah tujuan utama pemerintahan terbuka (ESCWA, 2020). Sedangkan OECD mendefinisikan *open government* sebagai budaya tata kelola yang mengedepankan prinsip transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung demokrasi dan pertumbuhan inklusif (OECD, 2017).

Ada pun indikator *e-government* meliputi: 1. inisiatif mendorong Pemprov DKI Jakarta yang terbuka dan partisipatif; 2. mewujudkan solusi inovatif bagi masyarakat (*e-government*), dalam

kerangka SDGs di DKI Jakarta. Berikut dikemukakan secara lengkap hasil penelitian maupun pembahasannya.

METODE

Lokasi dan Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pemprov DKI Jakarta, penelitian berlangsung selama 3 bulan yaitu mulai bulan September sampai dengan November 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, karena untuk memahami dan memecahkan permasalahannya dengan mendeskripsikan fakta untuk menggali informasi lebih dalam dari yang tampak dan teramati melalui data primer dan sekunder serta triangulasi, sehingga bisa mendapatkan jawaban menyeluruh tentang masalah, fenomena, dan juga kekuatan sosial. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya. Sehingga, penelitian kualitatif ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentitas (Creswell & Creswell, 2018).

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis terkait *electronic government* dan *open government* dalam kerangka SDGs di Pemprov DKI Jakarta.

Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penetapan informan dengan *purposive* yaitu Informan ditunjuk secara langsung oleh Peneliti, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu Informan adalah orang-orang yang benar-benar memahami substansi, permasalahan dan tujuan penelitian. Informan sebanyak 13 orang (Moleong, 2018).

Para Informan tersebut yaitu: inisial AA, dari Unit Lingkungan Sekretarian Daerah; ARM dari Unit Inspektorat; BR dari Unit Badan Perencanaan Daerah; WH dari Unit Badan Pengelola Keuangan Daerah; MH dari Unit Badan Pengelola Aset Daerah; RR dari Unit Badan Pendapatan Daerah; MK dari Unit Badan Kesatuan Bangsa; NH dari Unit Badan Pembinaan BUMD; MN dari Unit Badan Kepegawaian Daerah; SN dari Unit Badan Pengembangan SDM; RH dari Unit Dinas Sosial; Energi; SR dari Unit Lingkungan Hidup; RM dari Unit Perhubungan.

Instrumen Penelitian dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan instrumen observasi, wawancara mendalam (sebagai data primer) dan dokumen yaitu buku, hasil penelitian/jurnal, surat-surat (sebagai data sekunder), dan melakukan proses triangulasi (Alfanyur & Mariyani, 2020). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. reduksi data, sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Berikut 2. penyajian data, yaitu membatasi penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 3. menarik kesimpulan, yaitu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung (Miles & Huberman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inisiatif Mendorong Pemda DKI Jakarta Yang Terbuka dan Partisipatif dalam Kerangka SDGs.

Pemerintahan terbuka bagi Pemprov DKI Jakarta merupakan sebuah konsep pemerintahan yang telah dijalankan sekarang dan yang akan datang. Meskipun mempunyai sejarah yang panjang, momentum besarnya mengikuti pernyataan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sebagai masyarakat majemuk dan berpendidikan telah berpihak pada kebebasan. Landasan terkuat bagi kemajuan masyarakat Pemprov DKI Jakarta, terletak pada ekonomi

terbuka, masyarakat terbuka, dan pemerintahan terbuka, mendorong transparansi, untuk mencegah atau mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan.

Di samping itu, hal ini juga untuk memanfaatkan teknologi baru, sehingga memperkuat fondasi kebebasan masyarakat Jakarta sendiri dll. Semua ini dalam rangka mewujudkan cita-cita yang dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Pemprov DKI Jakarta yang terbuka, dengan para masyarakat sipilnya, sebagai komitmen untuk menumbuhkan budaya lokal, yang memberdayakan dan memberikan pelayanan bagi warga masyarakat Jakarta, dan memajukan cita-cita pemerintahan yang terbuka serta partisipatif di tahun 2023 dan seterusnya yaitu dengan menciptakan *Open Government Partnership*.

Ditegaskan, bahwa pemerintahan terbuka Pemprov DKI Jakarta saat ini, terbukti sebagai pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Pekerjaan semakin transparan dan akuntabel, dan setiap orang dapat mengakses layanannya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah tanggap terhadap kebutuhan warganya, menghargai partisipasi masyarakatnya dalam berbagai hal via Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Selain itu, pengalaman dan pengetahuan di lingkup pemerintahan dalam pengambilan keputusan, yang mengandalkan teknologi modern yang tengah berkembang, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahannya menuju standar SDGs yang ada. Peningkatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas merupakan tujuan utama pemerintahan terbuka Pemprov DKI Jakarta tersebut. Terdapat prinsip-prinsip dalam pemerintahan terbuka bagi Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI Jakarta, adalah termasuk dalam lingkup pembangunan di segala bidang yang berkelanjutan, menjadi elemen penting untuk mewujudkan visi pembangunan Pemprov DKI Jakarta yakni "Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua".

Pemprov DKI Jakarta, terdapat lima aspek yang menjadi prioritas dalam pembangunannya untuk mencapai visi tersebut, yang diterjemahkan dalam "Panca Upaya Utama" yang meliputi pembangunan manusia, ekonomi, dan infrastruktur, integritas aparatur, kota lestari, dan simpul kemajuan. Kelima aspek tersebut, menjadi jembatan strategis untuk mencapai Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya.

Panca Upaya Utama tersebut, secara lebih operasional dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang diluncurkan pada 16 April 2018 dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. RPJMD 2017-2022 tersebut telah dirumuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis baik skala nasional, regional, maupun internasional yang terkait erat dengan pembangunan di Pemprov DKI Jakarta di masa yang akan datang (RPJMD 2023-2027) dan seterusnya. Salah satu isu strategis berskala internasional tersebut yakni tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) (TPB/SDGs).

Pembangunan berkelanjutan di Pemprov DKI Jakarta ini, sebagai bentuk rencana aksi global yang dilaksanakan hingga tahun 2030, dan memiliki prinsip dasar untuk *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* atau yang dikenal dengan prinsip 5P. TPB/SDGs tersebut, terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator di tingkat global yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola secara terintegrasi. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah menetapkan 17 tujuan, 96 target dan 319 indikator yang relevan pada skala Nasional.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh *United Nation* (PBB) sejak tahun 2015, turut dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya di Pemprov DKI Jakarta. Berbagai tujuan dalam SDGs yang berjumlah 17 poin tersebut,

ditujukan untuk mencapai dunia yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi masalah global seperti kemiskinan, ketimpangan, hingga perubahan iklim. Di tingkat lokal yaitu di Pemprov DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BA PEDA) Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta, yang bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan SDGs tersebut.

Pemerintahan terbuka, bagi Pemerintah DKI Jakarta merupakan sebuah konsep pemerintahan yang telah dijalankan sekarang dan yang akan datang. Meskipun mempunyai sejarah yang panjang, momentum besarnya mengikuti pernyataan yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta sebagai masyarakat majemuk dan berpendidikan telah berpihak pada kebebasan.

Landasan terkuat bagi kemajuan masyarakat di di Pemprov DKI Jakarta, terletak pada ekonomi terbuka, masyarakat terbuka, dan pemerintahan terbuka, mendorong transparansi, untuk memerangi korupsi, mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dan pemerintahan, untuk memanfaatkan teknologi-teknologi baru, sehingga memperkuat fondasi kebebasan masyarakat Jakarta sendiri dan lainnya, semua ini dalam rangka mewujudkan cita-cita yang dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan.

Pemprov DKI Jakarta yang terbuka, dengan para pemimpin masyarakat sipilnya, sebagai komitmen untuk menumbuhkan budaya lokal, yang memberdayakan dan memberikan pelayanan bagi warga masyarakat Jakarta, dan memajukan cita-cita pemerintahan yang terbuka serta partisipatif di tahun 2023 yaitu dengan menciptakan *Open Government Partnership (Implementasi Keterbukaan Informasi Publik)* (Ardina & Saharuddin, 2021).

Ditegaskan di sini, bahwa pemerintahan terbuka di Pemprov DKI Jakarta saat ini, terbukti sebagai pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Pekerjaannya transparan dan akuntabel, dan setiap orang dapat mengakses layanannya. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta telah tanggap terhadap kebutuhan warganya, menghargai partisipasi masyarakatnya dalam berbagai hal via musrenbangnya. Juga pengalaman dan pengetahuan di lingkup pemerintahan dalam pengambilan keputusan, serta mengandalkan teknologi modern yang tengah berkembang, untuk meningkatkan tata kelola pemerintahannya menuju standar SDGs yang ada. Peningkatan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas adalah merupakan tujuan utama pemerintahan terbuka di Pemprov DKI Jakarta tersebut.

Terdapat prinsip-prinsip dalam pemerintahan terbuka bagi Pemprov DKI Jakarta, adalah termasuk dalam lingkup pembangunan di segala bidang yang berkelanjutan. Hal ini menjadi elemen penting untuk mewujudkan visi pembangunan di Pemprov DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yakni “Jakarta kota maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”. Di Pemprov DKI Jakarta, terdapat lima aspek yang menjadi prioritas dalam pembangunannya untuk mencapai visi tersebut.

Kelima aspek tersebut diterjemahkan dalam “Panca Upaya Utama” yang meliputi pembangunan manusia, ekonomi, dan infrastruktur, integritas aparatur, kota lestari, dan simpul kemajuan. Kelima aspek tersebut, menjadi jembatan strategis untuk mencapai Jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya.

Panca Upaya Utama tersebut, secara lebih operasional dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 yang diluncurkan pada 16 April 2018 dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. RPJMD 2017-2022 telah dirumuskan dengan memperhatikan isu-isu strategis baik skala nasional, regional, maupun internasional yang terkait erat dengan pembangunan di Pemprov DKI Jakarta di masa yang akan datang (RPJMD 2023-2027) dan seterusnya.

Salah satu isu strategis berskala internasional tersebut yakni tujuan pembangunan berkelanjutan /*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Pembangunan berkelanjutan di Pemprov DKI Jakarta ini, sebagai bentuk rencana aksi global yang dilaksanakan hingga tahun 2030, dan memiliki prinsip

dasar untuk *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partner ship* atau yang dikenal dengan prinsip 5P. TPB/SDGs tersebut, terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator di tingkat global yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola secara terintegrasi (Sofianto, 2019).

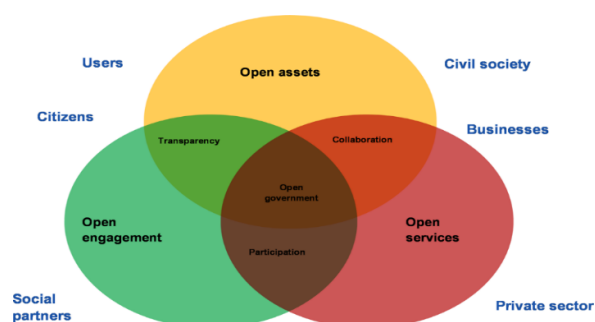
Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 07 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, telah menetapkan 17 tujuan, 96 target dan 319 indikator yang relevan pada skala Nasional. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan oleh *United Nation* (PBB) sejak tahun 2015, turut dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta.

Berbagai tujuan dalam SDGs yang berjumlah 17 poin tersebut, ditujukan untuk mencapai dunia yang lebih sejahtera, adil, dan berkelanjutan dalam upaya mengatasi masalah global seperti kemiskinan, kelaparan, ketimpangan, hingga perubahan iklim. Di tingkat lokal yaitu di Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretariat SDGs Provinsi DKI Jakarta, yang bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasi, dan mengawasi pelaksanaan SDGs.

Dengan demikian, pemerintahan di DKI Jakarta merupakan pemerintahan terbuka (*Open Government*), yang dijalankan sesuai budaya tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi, integritas, akuntabilitas, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam mendukung demokrasi dan pertumbuhan inklusif. Dalam pemerintahan terbuka di Pemprov DKI Jakarta terdapat prinsip dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum, sejarah, atau budayanya, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Open Government Partnership, mencakup tiga aspek inti yaitu aset terbuka (data pemerintah, perangkat lunak, spesifikasi, dan kerangka kerja yang terbuka, sehingga siapa pun dapat dengan bebas mengakses, menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang kontennya tanpa atau batasan terbatas seperti penggunaan komersial atau biaya keuangan, yaitu data pemerintah terbuka, layanan terbuka (layanan publik digital yang dapat digunakan kembali oleh administrasi publik lain atau pada akhirnya oleh pihak ketiga secara berurutan untuk memberikan layanan bernilai tambah, yaitu e-pemerintahan yang efisien dan keterlibatan terbuka (membuka proses pembuatan kebijakan publik kepada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat sipil, dunia usaha, serikat pekerja, atau bahkan warga negara (Nurdin, 2018).

Open Government tersebut, ditunjukkan dalam gambar 1 yaitu kerangka kerja untuk pemerintahan terbuka.



Gambar 1: Kerangka Kerja Untuk Pemerintahan Terbuka

Sumber: Millard (2017).Cham, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63743-31>

Terdapat hal-hal yang perlu dibahas secara lebih mendalam bahwa dalam *Open Government* di Pemprov DKI Jakarta mencakup konsep *Open Government Data* yang lebih terbuka akses, yang melibatkan gagasan bahwa di sebagian besar pemerintahan dan entitas publik, data harus tersedia secara bebas bagi semua orang untuk digunakan dan diterbitkan ulang sesuai keinginan mereka, tanpa batasan hak cipta, paten, atau mekanisme lainnya, karena dibiayai oleh uang publik dan merupakan barang publik.

Data harus: 1) terbuka secara *default*; 2) tepat waktu dan komprehensif; 3) dapat diakses dan digunakan; 4) dapat dibandingkan dan dapat dioperasikan; 5) untuk peningkatan tata kelola dan keterlibatan masyarakat; dan 6) untuk pembangunan dan inovasi yang inklusif. ODC (2017) menegaskan, bahwa data terbuka sebagai data digital yang tersedia dengan karakteristik teknis dan hukum yang diperlukan agar data tersebut dapat digunakan, digunakan kembali, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun.

OECD (2017) menegaskan bahwa data pemerintahan terbuka secara intrinsik merupakan bagian integral dari agenda pemerintahan terbuka. *Open Government Data* sebagai pondasi utama transparansi dan berbagai cara terkait lainnya, misalnya untuk melawan disinformasi di media sosial (Matasick, Alfonsi dan Bellantoni, 2020). Konseptualisasi *Open Government Data* juga muncul dari konsep *Open Data*, yang berkembang secara paralel di seluruh dunia dan sebagai respons terhadap perkembangan kekayaan intelektual dan peningkatan nilai komersialnya, terutama dengan percepatan peredaran dan akumulasi data informasi melalui *web* (revolusi data).

Terkait inisiatif mendorong Pemprov DKI Jakarta yang terbuka dan partisipatif dalam kerangka SDGs, hal ini telah dilakukan baik oleh masyarakat maupun Pemprov DKI Jakarta, di antaranya dengan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam pembangunan kota berkelanjutan di Jakarta. Pembentukan kota berkelanjutan dan berketahanan mulai dari penerapan program dari segi dokumen kebijakan, bentuk latar belakang permasalahan kompleks terkait pembangunan kota di Jakarta dan hambatan yang ada dalam proses tersebut, serta harapan solusi atau upaya untuk mengurangi hambatan permasalahan tersebut untuk mengimplementasikan SDGs di Jakarta secara garis besar.

2. Mewujudkan Solusi Inovatif Bagi Masyarakat, Mewujudkan *E-Government* Dalam Kerangka SDGs di DKI Jakarta.

Terkait solusi inovatif bagi masyarakat, mewujudkan *e-government* dalam kerangka SDGs di Pemprov DKI Jakarta, telah mengamalkan kebijakan bahwa dalam pelayanan keterbukaan informasi publik adalah amanah dari Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi keterbukaan informasi di Pemprov DKI Jakarta, daerah yang memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik tersebut (Damanik dan Purwaningsih, 2017).

Dalam mewujudkan Kota Jakarta menuju *Smart City*, maka diciptakan portal *open data* yang menyuguhkan data dari kota Jakarta secara akurat, serta transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Implementasi kebijakan program *Jakarta Open Data* dapat dilihat dari hasil kerja Humas Pemprov DKI Jakarta, yang mampu memberikan informasi secara terbuka tentang program dan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah membuat kebijakan sistem *Open Data*, terkait dengan sistem pelayanan dalam informasi publik. Pelaksanaan keterbukaan layanan informasi publik dapat diwujudkan melalui program *Jakarta Open Data*. Dilansir dari laman *website Jakarta Open Data*, dapat diketahui bahwa *Jakarta Open Data* merupakan salah satu program dari Pemprov DKI Jakarta berbentuk Portal Data Berbasis Terpadu yang menyediakan berbagai data dari keseluruhan Unit Kerja Pemerintah DKI Jakarta.

Selain itu, *Jakarta Open Data* juga dianggap sebagai cikal bakal dari cita-cita dan impian Pemprov DKI Jakarta guna menyajikan sebuah basis data pembangunan dengan pelayanan yang cukup valid, terbuka, serta terintegrasi. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.

181 Tahun 2014. Diberlakukannya kebijakan baru *Jakarta Open Data* tersebut lebih ditujukan pada keterbukaan layanan informasi publik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya portal data *Jakarta Open Data* ini, maka diharapkan *platform* berbasis *online* atau *web* (Sosiawan, 2015) tersebut dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang interaktif antar pejabat Pemprov DKI Jakarta supaya semua informasi atau pesan mengenai layanan informasi publik dapat tersampaikan pada masyarakat secara lebih efisien dan efektif. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 menyebutkan bahwa sebuah badan publik yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 wajib memberikan atau menyajikan berbagai informasi layanan publik di bawah naungan pemerintah kepada pihak pemohon informasi layanan publik, informasi yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di samping itu, badan atau lembaga publik di Pemprov DKI Jakarta wajib menyajikan layanan informasi publik secara lebih valid dan akurat, kemudian Pemprov DKI Jakarta membuat sebuah sistem yang disebut *e-government* dengan nama *Jakarta Open Data*. Tata kelola Pemerintahan yang baik, merupakan keinginan dari setiap warga Negara, khususnya warga masyarakat Jakarta.

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tujuan bersama seluruh warga DKI Jakarta, dengan terwujudnya hal tersebut, maka dapat dipastikan akan berimbas pada menurunnya angka korupsi dan maladministrasi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta yang baik dan sehat, juga telah meningkatkan kepeduliannya dan pelayanan terhadap kepentingan warganya. Marham (2017) menegaskan, bahwa pelayanan publik merupakan satu layanan pemerintah dengan memberikan jasa publik, baik dari pihak swasta, pemerintah, maupun masyarakat.

Bentuk dari sistem pelayanan informasi publik yang dianggap mudah dan efisien untuk dikembangkan yaitu *web*, semua sistem informasi yang dipublikasikan pada *web* tersebut dapat digunakan sebagai penyedia informasi, dan dapat pula digunakan untuk melakukan dialog dengan data, sehingga dapat memberikan sebuah informasi atau pesan dalam pengambilan keputusan tertentu (Puspitasari & Harasto, 2019).

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari pembuatan sistem informasi pada umumnya dan di yaitu untuk memberikan kelancaran dalam melakukan administrasi, menghemat biaya maupun waktu, serta mengurangi tenaga yang digunakan. Penerapan dari keterbukaan sistem layanan informasi publik di Pemprov DKI Jakarta yang dirasa bahwa daerah tersebut mempunyai posisi, fungsi, serta peran yang sangat penting dalam mewujudkan UU Keterbukaan Sistem Layanan Informasi Publik (Pratama & Ari, 2021). Hal tersebut dilandasi atas pertimbangan dan keputusan bahwa Pemprov DKI Jakarta mempunyai problematika yang sangat kompleks, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Sebagai pusat pemerintahan Indonesia, seluruh keputusan atau kebijakan yang telah dibuat dan diatur, akan sangat mempengaruhi provinsi lain yang ada di Indonesia. Terlebih lagi dalam hal penerapan UU Keterbukaan Sistem Layanan Informasi Publik. Oleh karena itu, perubahan dan dinamika dari UU tersebut dapat ditelusuri dengan cara memotret atau mencari tahu tentang yang sebenarnya terjadi di Pemprov DKI Jakarta saat ini. *E-Government* sebagai sarana pelayanan publik yang menggunakan *website* milik pemerintah dengan domain pemerintah Indonesia (*go.id*).

KESIMPULAN

Pemprov DKI Jakarta telah membuat kebijakan sistem *open data* terkait dengan sistem pelayanan dalam informasi publik. Pelaksanaan keterbukaan layanan informasi publik dapat diwujudkan melalui program *Jakarta Open Data*. *Jakarta Open Data* merupakan salah satu program dari Pemprov DKI Jakarta berbentuk Portal Data Berbasis Terpadu yang menyediakan berbagai data dari keseluruhan Unit Kerja di Pemprov DKI Jakarta.

Di samping itu, Pemprov DKI Jakarta dengan *Jakarta Open Data* telah menyajikan basis data pembangunan dengan pelayanan yang cukup valid, terbuka, serta terintegrasi. Hal ini telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 181 Tahun 2014. Diberlakukannya kebijakan baru *Jakarta Open Data* tersebut lebih ditujukan pada keterbukaan layanan informasi publik yang tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan adanya portal data *Jakarta Open Data* ini, maka diharapkan *platform* berbasis *online* atau *web* tersebut dapat digunakan sebagai sarana komunikasi yang interaktif antar pejabat pemerintah supaya semua informasi atau pesan mengenai pembangunan dengan pelayanan yang cukup valid, terbuka, serta terintegrasi dan menjadi program yang bermanfaat dan inovatif.

Di samping itu, dengan adanya *e-govern ment* di Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan dan mempermudah sarana komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat yang dilakukan dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat menunjang kegiatan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat maupun pihak swasta. Pelaksanaan *e-government* ini juga telah diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 181 Tahun 2014.

DAFTAR REFERENSI

- Alfansyur, A., & Mariyani, N., (2020). *Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial*. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Ardina, M., & Saharuddin, E., (2021). *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul*. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 49–61.
- Creswell, J., & Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. California: Sage, p. 43.
- Damanik M, P. dan Purwaningsih E, H, (2017). *E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)*.
- Jayanti N, K, D, Ari (2017). *Kajian Analisa: Penerapan dan Pengembangan E-Government pada Pemerintah Provinsi Bali*. Program Studi Sistem Informasi, STMIK STIKOM Bali.
- Lely P.D. Tampubolon (2016). *Pemeringkatan E-Government Indonesia (Pegi) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi di DKI Jakarta*.
- Masyhur F., (2017). *E-Government di Indonesia: Studi Literatur Sistematis dari Perspektif Dimensi Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)*(<https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/iptek/kom/issue/view/154>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, p. 23.
- Miles, M., Huberman, A., Rohidi, T., & Mulyarto (2014). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode-metode baru*/Matthew B. Miles, A. Michael Huberman; penerjemah, Tjetjep Rohendi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), p. 31.
- Mariam, S. M. N., (2017). *Mewujudkan good governance Melalui Pelayanan Publik*. *JIPSI: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 6(1), 1–17.
- Nurdin A, H, M, Nurdin (2018). *Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan e-govern ment*. *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*: Vol.5, No.1 – Juni 2018. <https://www.researchgate.net/profile/Andi-Heny>.
- Pratama, B., & Ari, D. (2021). *Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik*. *Surya Abdimas*, 5(3), 312–321.
- Puspitasari, A. E., & Harsasto, P., (2019). *Penerapan Transparansi Melalui Web site (www.jakarta.go.id) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Periode Tahun 2017-2018)*. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(2), 91–100.

- Sosiawan, E. A. (2015). *Evaluasi Implementasi e-government Pada Situs Web Pemerintah Daerah Indonesia: Perspektif Content dan Manajemen Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF)*. Seminar Nasional Informatika, 1(5).
- Sofianto A, (2019). *Integrasi Target Dan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs) Ke dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah*. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Vol 20 No 2.

